

ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang)

Analysis of Community Response towards The Management of Village Fund for Rural Development (Pesantren Village, Ulujami Ulujami Subdistrict, Pemalang)

Tisha Alya Arifiani¹⁾ dan Sofyan Sjaf¹⁾

¹⁾Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia

Email: tishaalya29.ta@gmail.com; sofyansjaf@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Government effort for increasing and leveling rural development done by village funds allocation as mandated by UU No. 6 Tahun 2014 about also by Government Regulation (PP) No. 60 Tahun 2014 about village funds that sourced from APBN. Referred to village funds purpose which is for increasing community welfare so for the management community should involve. The purpose from this research is analyzing how's the community's attitude and participation towards village funds management and to analyze how's the level of inequality distribution of development results. The methods that being used in this research is quantitative methods supported with qualitative data and using analysis of multiple linear regression test. The results of this research shown if community's attitude who joined village discussion tend positively and the participation level is high, while the community's attitude who wasn't join the village discussion tend negatively and the participation level is low. The community's responses is affecting the transparency level and accountability of village funds management.

Key words: *community's responses, village development, village funds*

ABSTRAK

Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan desa dilakukan melalui pengalokasian dana desa sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Merujuk tujuan dari dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pengelolaannya harus melibatkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sikap dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa serta untuk menganalisis bagaimana tingkat ketimpangan pendistribusian hasil pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang mengikuti musyawarah desa cenderung positif dan tingkat partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah cenderung memiliki sikap yang negatif dan tingkat partisipasi yang rendah. Respon masyarakat tersebut mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: dana desa, pembangunan pedesaan, respon masyarakat

PENDAHULUAN

Dewasa ini desa kerap identik dengan permasalahan struktural seperti keterbelakangan dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia sendiri berada di wilayah desa. Hal tersebut sesuai dengan data dari BPS (2016) yang menyatakan bahwa pada periode September 2015-Maret 2016, jumlah penduduk

miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,34 juta orang, sementara di daerah pedesaan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,67 juta orang. Adanya ketimpangan antara desa dan kota membuat arah pembangunan kini lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa dan daerah.

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang terencana yang melibatkan peran negara dan terjadi pada kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem dan aktivitas ekonomi serta sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya pendapatan. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari besarnya kemauan dan kemampuan untuk mandiri, yaitu adanya kemauan masyarakat untuk menciptakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Purwaningsih, 2008).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana desa sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang Desa. Penggunaan dana desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harning (2016) terdapat kendala yang menghambat kegiatan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan, serta pencairan dana yang terlambat. Adapun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih kurang.

Desa Pesantren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang, yang sejak tahun 2015 sudah menerima dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Pengelolaan dana desa di Pesantren dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Agar dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaannya maka dibutuhkan respon yang positif dari masyarakat, oleh sebab itu penting diketahui seberapa besarkah respon masyarakat Desa Pesantren terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan?

Respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya

adalah sikap dan partisipasi masyarakat. Sikap positif atau sikap mendukung dari masyarakat sangat diperlukan di dalam pengelolaan dana desa agar tujuan dari pengalokasian dana desa tersebut dapat dicapai. Di Desa Pesantren sendiri tidak semua masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan karakteristik lingkungan sosial dan juga karakteristik personal masyarakatnya. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis bagaimana sikap masyarakat Desa Pesantren terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan?

Berbicara mengenai pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan tentu tidak akan lepas dari masalah partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan. Di dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Novia (2015) mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaat program alokasi dana desa di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau diketahui bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan juga tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka kurang dapat memahami program alokasi dana desa. Selain itu pengambilan keputusan dilakukan oleh elit desa saja. Melihat kondisi seperti itu maka penulis ingin menganalisis: bagaimana partisipasi masyarakat Desa Pesantren dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan?

Dana desa yang bersumber dari APBN menurut Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2016 harus dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adanya respon positif dari masyarakat sangatlah memungkinkan untuk mencapai pengelolaan dana desa sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam PP tersebut sehingga pengalokasian dana desa untuk pembangunan pedesaan dapat mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat desa sehingga ketimpangan pendistribusian hasil pembangunan yang selama ini dihadapi oleh desa dapat diminimalisir. Oleh karena itu menarik untuk meneliti bagaimana

tingkat ketimpangan pendistribusian hasil pembangunan dari dana desa?

PENDEKATAN TEORITIS

Respon

Respon adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap rangsangan atau stimulus yang dihadapinya. Tanggapan terjadi setelah seseorang memperhatikan, memahami, dan menerima, stimulus yang menghampirinya. Respon itu muncul sebagai perwujudan motif yang timbul setelah seseorang menilai obyek respon (Sulasmono 1994).

Respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian rangsangan dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomena dari rangsangan-rangsangan proksimal tersebut (Adi dalam Desrita 2016). Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu. Jadi berbicara mengenai respon atau tidak respon tidak terlepas dari pembahasan sikap (Desrita 2016).

Sikap

Isnaini dan Siregar (2015) menyatakan sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Menurut Kusriani *et al.* (2013) terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Karakteristik lingkungan sosial, merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap program. Karakteristik lingkungan sosial dijabarkan oleh peubah teramati seperti dukungan tokoh masyarakat, peran kelompok dan intensitas kegiatan program.

Akbar *et al.*(2015) mengatakan bahwa dukungan tokoh masyarakat adalah dukungan yang diperoleh dari hubungan interpersonal yang mengacu pada kesenangan, ketenangan, bantuan manfaat, yang berupa informasi verbal yang diterima seseorang atau masyarakat dari tokoh masyarakat yang membawa efek perilaku.

Dukungan tokoh masyarakat dibedakan menjadi dukungan emosional yang mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian. Dukungan penghargaan mencakup ungkapan hormat dan dorongan untuk maju. Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan informatif mencakup nasehat, petunjuk, saran dan umpan balik.

Peubah teramati selanjutnya adalah peran kelompok, dimana Rukka *et al.* (2008) mengemukakan bahwa keberadaan kelompok merupakan salah satu potensi yang mempunyai peranan penting dalam membentuk perubahan perilaku anggotanya dan menjalin kemampuan kerjasama anggota kelompoknya.

Peubah teramati yang terakhir dalam karakteristik lingkungan sosial adalah intensitas kegiatan program.

- b. Pengelolaan program, merupakan faktor kedua dan yang berhubungan dengan sikap masyarakat terhadap program. Hubungan tingkat pengelolaan program terhadap sikap masyarakat terhadap program dijabarkan dalam empat peubah teramati, yaitu kejelasan program (konteks), pengelolaan sumberdaya (*input*), pelaksanaan kegiatan program (*proses*), dan tingkat pencapaian program.
- c. Karakteristik personal, merupakan ciri khas yang melekat pada individu yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan individu tersebut.

Karakteristik personal dapat menjadi pembeda yang khas antara satu individu dengan individu lainnya, yakni: umur, tingkat pendidikan formal, pendidikan nonformal, jumlah tanggungan, tingkat kekosmopolitan, dan tingkat pengetahuan.

Seseorang yang dalam usia produktif cenderung memiliki kondisi fisik dan psikis yang optimal dalam bekerja (Kusrini *et al.* 2013) Korelasi negatif antara umur dan sikap menunjukkan bahwa semakin tua umur seseorang akan berdampak pada semakin rendahnya sikap terhadap objek disekitarnya.

Pada hakikatnya, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia, baik individu maupun sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusrini *et al.* (2013) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan responden mengakibatkan nilai korelasi negatif. Sifat yang ditunjukkan oleh responden cenderung dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Peubah kekosmopolitan berhubungan dengan keterbukaan responden dengan dunia luar, terkait informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan terhadap kegiatan pemberdayaan.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat desa adalah keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok bertalian dengan potensi yang dimiliki mereka berupa dana, tenaga kerja, dan pikiran secara sukarela di dalam pembangunan. Partisipasi ini dapat pula, berupa kerja sama secara nyata seperti saling membantu membuat jalan desa, saluran pembuangan air, dan prasarana sosial lainnya di desa. Selain itu, kerja sama membuat rumah secara bergilir, kebun sawah, ataupun kepentingan-kepentingan lainnya (Tumbel 2014).

Uphoff dan Cohen (1979) mengemukakan bahwa terdapat empat tahap partisipasi, yaitu:

1. Tahap pengambilan keputusan, yang diwujudkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat.
2. Tahap pelaksanaan, merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti terpenting dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi dalam tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.

3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran
4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Pedesaan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan desa dilakukan melalui penglokasian dana desa yang merupakan amanat UU No.6/2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Dana desa menurut UU No. 6/2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sendiri menurut Permendes No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Agar tujuan dialokasikannya dana desa dapat tercapai maka prinsip-prinsip pengelolaan dana desa haruslah diterapkan oleh pelaksana. Di dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pedesaan.

Transparansi menurut Iqsan (2016) merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat, dengan kata lain transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Fajri *et al.* 2015).

Adanya dana desa diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pembangun antara kota dan desa. Merata atau tidaknya pendistribusian hasil pembangunan yang telah dilakukan dapat diketahui dengan menggunakan sebuah tolak ukur pemerataan distribusi pendapatan yang disebut dengan Indeks Gini.

Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna) (Mopangga 2011). Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol dan sebaliknya jika nilai koefisien Gini mendekati satu maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau timpang.

Tabel 1 Patokan nilai koefisien gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4-0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

Koefisien gini dapat dihitung dengan menggunakan data mengenai pengeluaran rumah tangga masyarakat. Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan masyarakat di suatu wilayah atau daerah (Syamsuddin 2011).

Kerangka Pemikiran

Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan desa dilakukan melalui pengalokasian dana desa yang merupakan amanat UU No.6/2014 tentang Desa serta PP No. 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015.

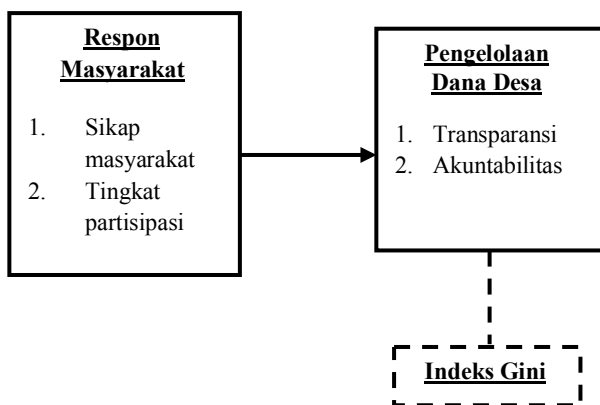
Masyarakat sebagai subyek dari pembangunan diharapkan memiliki respon yang positif terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pedesaan. Adi dalam Desrita (2016) menyatakan bahwa respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian ransangan dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomena dari rangsangan-rangsangan proksimal tersebut maka dari itu respon dalam penelitian ini dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan.

Sikap masyarakat tidak semata-mata timbul begitu saja namun ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang. Fakyor-faktor tersebut adalah karakteristik lingkungan sosial, pengelolaan program, dan karakteristik personal (Kusrini *et al.* 2013).

Di dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan faktor karakteristik lingkungan sosial yang diukur melalui peubah teramati dukungan tokoh masyarakat dan peran kelompok dan karakteristik personal masyarakat yang diukur melalui peubah usia dan tingkat pendidikan.

Sebuah pembangunan dapat terlaksana apabila masyarakat memberikan respon atau umpan balik berupa keikutsertaan aktif masyarakat (partisipasi) mulai dari tahap perencanaan hingga tahap menikmati hasil. Oleh karena itu selain melihat respon masyarakat dari aspek sikap, penulis juga melihat respon masyarakat dari aspek partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan yang diukur dari keikutsertaan masyarakat pada proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

Respon yang positif dari masyarakat sangat berpotensi untuk dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan amanat pemerintah yang terkandung dalam Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2016 yaitu bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan melihat bagaimana respon masyarakat mempengaruhi tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.



Keterangan
 —————> : mempengaruhi
 - - - - - : menunjukkan keadaan

Gambar 1 Kerangka pemikiran

Tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat mewujudkan

tujuan dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan ketimpangan pembangun di desa dapat diminimalisir.

Agar diketahui apakah pendistribusian hasil pembangunan yang telah dilakukan sudah merata atau sebaliknya maka kita dapat menggunakan sebuah tolak ukur pemerataan distribusi pendapatan yang disebut dengan Indeks Gini (Gambar 1).

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat pada Gambar 1, maka hipotesis yang diajukan adalah diduga respon masyarakat mempengaruhi pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Sementara itu, data kualitatif merupakan data hasil dari wawancara mendalam, observasi lapang, dan penelusuran dokumen serta didukung oleh catatan harian lapang.

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan secara *purposive* (sengaja) karena beberapa pertimbangan, diantaranya adalah: 1) Desa Pesantren merupakan salah satu desa yang menerima dana desa sejak tahun 2015 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara swadya; 2) Desa Pesantren sudah mulai melakukan transparansi dengan cara membuat baliho dan poster yang berisi transparansi penggunaan dana desa, dan 3) pembangunan di Desa Pesantren menjadi meningkat setelah menerima dana desa. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Juli 2017.

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Populasi penelitian ini merupakan masyarakat yang berusia dewasa (memenuhi kriteria untuk mengikuti kegiatan musyawarah pengelolaan dana desa). Responden

atau unit analisis penelitian ini adalah individu usia dewasa yang dibedakan dalam kategori individu yang mengikuti musyawarah dan individu yang tidak mengikuti musyawarah pengelolaan dana desa.

Teknik pengambilan sampel sendiri menggunakan *Cluster Random Sampling*. Teknik ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh respon masyarakat yang dilibatkan dalam musyawarah pengelolaan dana desa dan masyarakat yang tidak dilibatkan dalam musyawarah pengelolaan dana desa. Pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja (*purposive*) melalui metode *snowball*. Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari BPD, LPM, dan perangkat desa.

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan data BPS. Teknik pada pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui kuesioner, sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan melakukan reduksi data, yakni pemilihan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan terhadap data sehingga menjawab tujuan penelitian. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan *Microsoft Excel 2010* sebelum dimasukkan ke perangkat lunak *SPSS for Windows* untuk mempermudah pengolahan data. Uji statistik yang digunakan yakni uji regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antara variabel yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan tokoh masyarakat

Pada Desa Pesantren yang dianggap sebagai tokoh masyarakat adalah para alim ulama atau kyai dan orang yang dituakan.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui jika dukungan tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah tinggi, sedangkan

dukungan tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah adalah rendah.

Tabel 2 Jumlah dan persentase dukungan tokoh masyarakat Desa Pesantren

Masyarakat	Dukungan Tokoh Masyarakat						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Ikut musyawarah	6	30	6	30	8	40	20	100
Tidak ikut musyawarah	19	95	1	5	0	0	20	100

Tingginya dukungan tokoh masyarakat terhadap masyarakat yang mengikuti musyawarah karena tokoh masyarakat memberikan berbagai jenis dukungan kepada masyarakat. Dukungan penghargaan diwujudkan dalam menyampaikan permasalahan masyarakat kepada pengelola dana desa dengan sopan pada saat musyawarah desa.

Dukungan instrumental diwujudkan dalam bantuan tenaga seperti hadirnya tokoh masyarakat dalam musyawarah desa, serta dukungan informatif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan mengenai kegiatan apa saja yang sebaiknya dilaksanakan dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepada pihak pengelolala.

Berbeda dengan anggota masyarakat yang mengikuti musyawarah, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah menyatakan bahwa dukungan tokoh masyarakat adalah rendah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada dasarnya tidak mengikuti musyawarah sehingga mereka tidak tahu jika tokoh masyarakat juga terlibat dalam musyawarah pengelolaan dana desa. Ketidaktahuan masyarakat ini kemudian menjadikan mereka beranggapan jika tokoh masyarakat tidak aktif dalam kegiatan desa seperti musyawarah untuk mengelola dana desa. Anggapan mereka juga didukung dengan keadaan di lapang yang menunjukkan bahwa tokoh masyarakat tidak pernah memberikan dukungan apapun baik itu dukungan instrumental, penghargaan dan informatif.

Peran kelompok

Pada penelitian ini, kelompok yang dipilih adalah kelompok pengajian. Alasan dipilihnya kelompok pengajian adalah karena kelompok pengajian merupakan kelompok yang anggotanya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat yang bekerja sebagai petani, swasta, pegawai negeri sipil (PNS), dan lain sebagainya, atau masyarakat yang termasuk ke dalam elit desa serta masyarakat umum. Hal tersebut membuat kelompok pengajian tidak hanya terbuka untuk kalangan tertentu saja agar dapat menjadi anggotanya, atau sifat keanggotaannya terbuka.

Selain itu, beberapa kelompok pengajian yang ada di Desa Pesantren juga digunakan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai pengelolaan dana desa, dengan demikian kelompok pengajian selain sebagai wadah untuk belajar mengenai masalah keagamaan bagi para anggotanya juga memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai wadah untuk bertukar informasi.

Baik masyarakat yang mengikuti musyawarah maupun yang tidak mengikuti musyawarah menyatakan peran kelompok pengajian dalam membentuk sikap anggotanya adalah rendah (Tabel 4).

Tabel 4 Jumlah dan persentase peran kelompok Desa Pesantren

Masyarakat	Peran Kelompok						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Ikut musyawarah	11	55	3	15	6	30	20	100
Tidak ikut musyawarah	15	75	3	15	2	10	20	100

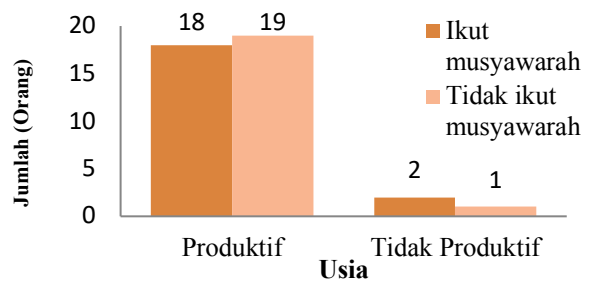
Rendahnya peran kelompok dalam membentuk sikap masyarakat agar dapat pro aktif dalam mengelola dana desa adalah karena kelompok pengajian sendiri hanya dimanfaatkan untuk membahas mengenai materi keagamaan saja.

Jika terdapat kelompok pengajian yang menyampaikan materi seputar pengelolaan dana desa itu pun terbatas dan hanya dilakukan di sebagian kecil kelompok pengajian. Biasanya kelompok pengajian yang terkadang membahas

mengenai pengelolaan dana desa adalah kelompok pengajian yang memiliki anggota yang aktif dalam mengelola dana desa seperti para elit desa.

Usia

Berdasarkan penggolongan usia menurut BPS, seseorang dapat dikatakan berada dalam usia produktif jika berusia antara 15-64 tahun, dan bagi seseorang yang berusia lebih dari 64 tahun artinya mereka termasuk kedalam kelompok usia tidak produktif.



Gambar 2 Sebaran usia responden Desa Pesantren tahun 2017

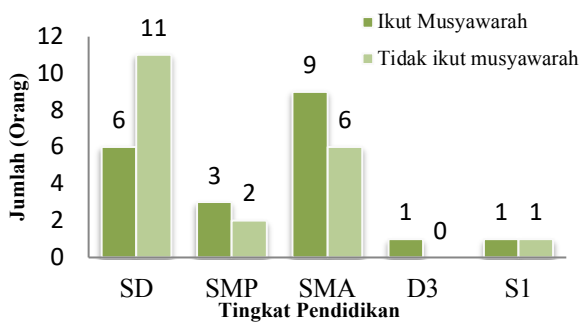
Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa baik masyarakat yang mengikuti musyawarah atau yang tidak mengikuti musyawarah sama-sama didominasi masyarakat yang berada di dalam usia produktif. Keduanya memiliki potensi yang besar untuk dapat terlibat secara aktif dalam mengelola dana desa. Usia yang masih produktif menurut Kusriani *et.al* (2013) membuat masyarakat memiliki kondisi fisik dan psikis yang dapat bekerja secara optimal.

Jika dilihat dari aspek partisipasi, masyarakat yang mengikuti musyawarah yang berada dalam kelompok umur produktif memang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada masyarakat usia produktif yang tidak mengikuti musyawarah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang mengikuti musyawarah memang terlibat langsung dalam setiap tahap partisipasi. Berbeda dengan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah yang hanya terlibat saat tahap pelaksanaan dan menikmati hasil.

Pendidikan

Masyarakat yang mengikuti musyawarah memiliki lima jenjang pendidikan yaitu SD, SMP,

SMA, D3 dan S1. Jenjang pendidikan yang paling tinggi yang dimiliki oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah jenjang pendidikan SMA. Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah hanya memiliki empat jenis jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan S1. Mayoritas masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah (11 responden) hanya menamatkan pendidikannya pada jenjang pendidikan SD (Gambar 3).



Gambar 3 Sebaran tingkat pendidikan responden Desa Pesantren tahun 2017

Perbedaan mayoritas tingkat pendidikan antara masyarakat yang mengikuti musyawarah dengan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah membuat sikap keduanya terhadap pengelolaan dana desa juga berbeda. Masyarakat yang mengikuti musyawarah dan mayoritas memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki sikap yang lebih positif terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat di dalam proses pengelolaan dana desa.

Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah desa, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal tersebut turut mempengaruhi sikap mereka terhadap pengelolaan dana desa. Masyarakat cenderung tidak terlalu memperdulikan bagaimana dana desa dikelola. Melihat sikap masyarakat yang demikian itu, dapat dikatakan jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam mengelola dana desa dikarenakan pengetahuan mereka mengenai pengelolaan dana desa lebih

rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan lebih tinggi.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Dana Desa

Partisipasi masyarakat yang mengikuti musyawarah tergolong tinggi. Partisipasi masyarakat yang tinggi tersebut terjadi karena mereka melaksanakan setiap tahap partisipasi mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi (Tabel 5).

Tabel 5 Jumlah dan persentase partisipasi responden Desa Pesantren

Masyarakat	Partisipasi						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Ikut musyawarah	0	0	3	15	17	85	20	100
Tidak ikut musyawarah	11	55	9	45	0	0	20	100

Tahap perencanaan diwujudkan dengan mengikuti musyawarah desa yang dilaksanakan untuk membahas mengenai perencanaan pembangunan pedesaan yang dananya bersumber dari dana desa.

Pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk bantuan tenaga berupa gotong royong. Wujud lain dalam partisipasi tahap ini adalah sumbangan pemikiran atau ide dan materi.

Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil ditunjukkan dengan adanya manfaat yang dirasakan dari pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat mengaku jika setelah dilakukan berbagai pembangunan infrastruktur kegiatan atau mobilitas mereka sehari-hari menjadi mudah.

Tidak hanya menikmati manfaat dari pembangunan yang sudah dilaksanakan, masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara hasil dari pembangunan tersebut. Salah satu contoh bentuk tanggung jawabnya adalah dengan membersihkan saluran

drainase yang terkadang mampet sehingga membuat aliran airnya tidak lancar.

Tahap yang terakhir atau tahap evaluasi diwujudkan dengan diadakannya rapat evaluasi. Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan setiap selesai melaksanakan satu pembangunan dan evaluasi jika semua kegiatan pembangunan sudah selesai dilaksanakan.

Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah desa, partisipasi masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa tergolong rendah. Tingkat partisipasi masyarakat yang tergolong rendah ini dipengaruhi oleh ketidakikutsertaan mereka dalam semua tahap partisipasi. Dari empat tahap partisipasi, mereka hanya terlibat dalam dua tahap partisipasi saja, yaitu tahap pelaksanaan dan menikmati hasil. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau lebih tepatnya mereka tidak mengikuti musyawarah baik itu tingkat dusun maupun tingkat desa

“saya tidak pernah diundang untuk ikut rapat-rapat, biasanya yang ikut rapat itu perangkat-perangkat, RT dan RW.....”(RSH, 43 tahun)

Meskipun mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, namun mereka turut serta dalam proses pelaksanaan. Masyarakat turut memberikan sumbangan tenaga yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong melaksanakan proyek pembangunan. Selain bantuan tenaga, bantuan materi juga diberikan oleh warga dalam bentuk iuran jimpitan dan konsumsi saat sedang gotong royong.

Manfaat yang dirasakan masyarakat cukup banyak dengan adanya pembangunan seperti adanya peningkatan pendapatan dan semakin mudahnya mobilitas masyarakat karena jalan baik jalan utama maupun jalan kecil yang ada di gang-gang sudah diperbaiki baik diaspal maupun di beton.

Salah satu warga menuturkan bahwa sekarang ini toko miliknya menjadi banyak pembeli setelah jalan utama yang berada di depan tokonya diperbaiki. Sebelum jalan tersebut diperbaiki jarang sekali ada orang yang membeli dagangan

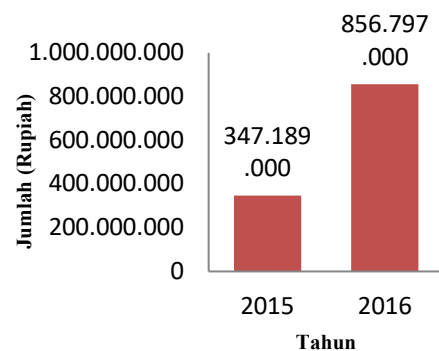
di warungnya karena kondisi jalan yang susah untuk dilewati. Saat ini ia juga tidak perlu repot-repot ke pasar untuk membeli keperluan dagangannya karena sekarang sudah ada distributor yang rutin mengantarkan beberapa jenis barang dagangan ke tokonya. Oleh karena itu keuntungannya dapat meningkat karena hal tersebut.

Masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun. Hal tersebut ditunjukkan dengan cara memperbaiki jalan yang sudah mulai rusak, membersihkan saluran air, dan lain sebagainya.

Profil Dana Desa di Desa Pesantren

Pengelolaan dana desa di Desa Pesantren sendiri diawali dengan adanya musyawarah baik tingkat dusun maupun tingkat desa. Peserta musyawarah sendiri didominasi oleh para elit desa seperti ketua RT dan RW, perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Musyawarah perencanaan dilaksanakan untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan selama setahun kedepan dengan menggunakan biaya dari dana desa.

Besarnya dana desa yang diterima oleh Desa Pesantren berbeda-beda setiap tahunnya.



Gambar 4 Penerimaan dana desa di Desa Pesantren tahun 2015-2016

Pada tahun 2015, Desa pesantren untuk pertama kalinya mendapat bantuan dana desa dari pemerintah. Besarnya dana desa yang diterima saat tahun 2015 adalah Rp347.189.000, kemudian pada tahun 2016 Desa Pesantren kembali menerima dana desa namun kali ini jumlah yang diterimanya lebih besar yaitu Rp856.797.000 (lihat Gambar 4). Kenaikan dana desa setiap

tahunnya menurut pemerintah Desa Pesantren dikarenakan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Kebijakan tersebut mengacu pada data laporan pelaksanaan tahun sebelumnya yang dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Bertambahnya jumlah dana desa pada setiap tahunnya menjadi kesempatan bagi Desa Pesantren untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan desanya. Diketahui jika selama ini dana desa yang diterima Desa Pesantren digunakan seluruhnya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur (Tabel 6). Meskipun di dalam UU No. 5 Tahun 2015 dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun Desa Pesantren hanya menggunakan dana desa tersebut untuk pembangunan saja dan tidak ada dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat lebih mengarah untuk perbaikan infrastruktur desa.

Tabel 6 Realisasi penggunaan dana desa di Desa Pesantren tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase (%)	Rincian Penggunaan (Rp)	
2015	347.189.000	100	Makadam jalan	138.875.600
			Talud/senderan	138.875.609
			Rabat beton	69.437.800
Total				347.189.000
2016	856.797.000	100	Rabat beton	194.571.500
			Pengaspalan jalan	176.438.900
			Saluran drainase	147.654.200
			Talud/senderan	338.187.400
			Total	

Proses pelaksanaan pembangunan di Desa Pesantren sendiri dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, biasanya pemerintah desa mengadakan rapat evaluasi. Rapat evaluasi tersebut dilakukan selama dua tahap, tahap pertama dilakukan apabila satu proyek pembangunan sudah selesai dilaksanakan (evaluasi di tengah kegiatan) dan tahap kedua dilaksanakan ketika semua proyek pembangunan telah selesai dilaksanakan..

Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pesantren

Desa Pesantren merupakan salah satu desa yang memiliki cara tersendiri untuk mentransparansikan pengelolaan dana desanya. Cara mereka untuk transparansi tersebut adalah dengan membuat sebuah papan informasi dalam bentuk baliho besar yang didalamnya memuat beberapa konten seperti jumlah pendapatan desa, sumber pendapatan desa, dan rencana penggunaan dana desa. Baliho tersebut dipasang di depan kantor kepala Desa Pesantren.

Selain dalam bentuk baliho yang dipasang di depan kantor kepala desa, bentuk transparansi dari pemerintah Desa Pesantren adalah dengan membuat poster yang kontennya juga sama dengan baliho namun poster tersebut dipublikasikan melalui media sosial seperti *Twitter* dan *Facebook*.

Tabel 7 Jumlah dan persentase transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pesantren

Masyarakat	Transparansi						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		N	%
	n	%	n	%	n	%		
Ikut musyawarah	2	10	10	50	8	40	20	100
Tidak ikut musyawarah	17	85	3	15	0	0	20	100

Berdasarkan tabel 7, tingkat transparansi dana desa menurut masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah tinggi. Berbeda dari masyarakat yang mengikuti musyawarah, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pesantren menurut masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah adalah rendah.

Pengaruh Respon Masyarakat terhadap Tingkat Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Merujuk pada uji regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa respon masyarakat yang mengikuti musyawarah berpengaruh terhadap tingkat transparansi pengelolaan dana desa. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai prob. F hitung (sig.) bernilai 0.002 yang nilainya lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,2. Dari lima variabel respon, terdapat empat variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat transparansi pengelolaan dana desa yaitu variabel usia, tingkat

pendidikan, dukungan tokoh masyarakat dan partisipasi.

Meskipun menurut hasil uji regresi menunjukkan jika respon masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat transparansi pengelolaan dana desa, hal tersebut tidak membuat tingkat transparansi pengelolaan dana desa tinggi. Pada kenyataannya tingkat transparansi pengelolaan dana desa sendiri menurut masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah sedang (Tabel 7).

Tingkat transparansi pengelolaan dana desa yang tergolong sedang ini dikarenakan tidak semua indikator transparansi dapat terpenuhi, seperti penggunaan dana desa belum mampu memenuhi kebutuhan paling dasar dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan dari masyarakat dan semuanya ingin dijadikan prioritas utama, namun padahal jumlah dana desa sendiri terbatas sehingga tidak semua kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi.

Hal lain yang membuat tingkat transparansi pengelolaan dana desa sedang karena masyarakat merasa bahwa sistem pembagian besarnya dana desa untuk tiap dusun kurang sesuai karena selama ini pembagian besarnya dana desa hampir sama di setiap dusun, padahal masing-masing dusun memiliki luas wilayah yang berbeda dan juga kebutuhan yang berbeda pula.

Respon masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah secara keseluruhan berpengaruh terhadap tingkat transparansi pengelolaan dana desa. Hal tersebut ditunjukkan dengan Nilai prob. F hitung (sig.) bernilai 0.003 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0.2 Respon masyarakat yang negatif membuat tingkat transparansi rendah. Hal tersebut diantaranya karena pemerintah desa sendiri jarang sekali menyampaikan informasi apapun terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah. Meskipun pemerintah desa telah membuat pengumuman dalam bentuk baliho yang memuat info-info tentang penggunaan dana desa yang dipasang di depan kantor balai desa maupun poster yang diunggah dalam media sosial, hal tersebut dirasa tidak efektif untuk menyampaikan informasi

tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat.

Ketidakefektifan tersebut dikarenakan letak pemasangan baliho yang berada di depan kantor kepala desa dirasa kurang tepat. Tidak semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses baliho tersebut terlebih lagi bagi mereka yang tinggal di Dusun Pesadean dan Dusun Sidomulyo karena letak dusun mereka cukup jauh dari kantor kepala desa. Oleh karena itu jika tidak ada kepentingan, masyarakat jarang sekali untuk pergi ke dusun lain ataupun ke kantor kepala desa, dengan kondisi tersebut otomatis masyarakat pun tidak mengetahui jika pemerintah desa telah membuat sebuah pengumuman mengenai penggunaan dana desa yang disampaikan dalam bentuk baliho. Selain lewat baliho, poster yang diunggah melalui media sosial juga dirasa tidak efektif karena tidak tepat sasaran. Masyarakat Desa Pesantren sendiri jarang sekali yang mengakses *Twitter* dan *Facebook* yang merupakan media untuk mempublikasikan poster.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pesantren

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut masyarakat yang mengikuti musyawarah desa adalah tinggi, sedangkan tingkat akuntabilitas masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa adalah rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui data yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Jumlah dan persentase akuntabilitas pengelolaan dana desa

Masyarakat	Akuntabilitas						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Ikut musyawarah	1	5	1	5	18	90	20	100
Tidak ikut musyawarah	17	85	2	10	1	5	20	100

Pengaruh Respon Masyarakat terhadap Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pesantren

Respon masyarakat yang mengikuti musyawarah ternyata berpengaruh terhadap tingkat

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji regresi menyatakan jika nilai prob. F hitung (sig.) nya bernilai 0.2. Variabel yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan adalah usia dan partisipasi masyarakat.

Keaktifan masyarakat dalam mengikuti setiap tahap pengelolaan dana desa mempengaruhi pemerintah desa atau pengelola melaksanakan pengelolaan desa secara akuntabel. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pesantren menurut masyarakat yang mengikuti musyawarah adalah tinggi.

Tingginya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pesantren menurut masyarakat adalah karena pemerintah desa menyampaikan berbagai informasi terkait hasil kinerja tim pelaksana kegiatan, pencapaian program yang telah dilaksanakan, dan laporan keuangan desa.

Bentuk lain pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan desa adalah dengan membuat laporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pelaporan tersebut dilakukan kepada dua pihak yaitu pihak yang berada di atas pemerintah desa seperti bupati atau walikota dan pihak yang berada di bawah pemerintah desa seperti BPD atau masyarakat desa. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang mengikuti musyawarah desa adalah dengan menyampaikan dokumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPDES).

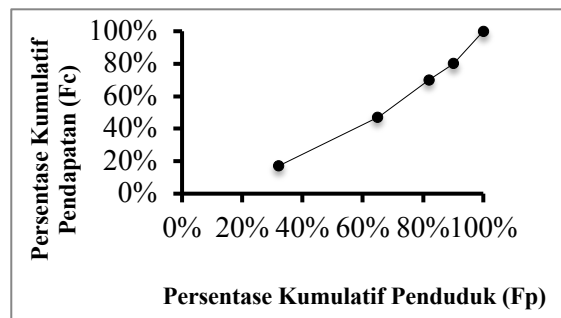
Sejalan dengan hasil regresi, respon masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah juga berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai prob. F hitung (sig.)nya bernilai 0.000.

Terlepas dari kedua variabel yaitu dukungan tokoh masyarakat dan peran kelompok yang berpengaruh secara signifikan, jika merujuk kepada pasal 2 ayat 1 dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Cara Mengelola Anggaran Dana Desa dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa sendiri

belum sepenuhnya melakukan pelaporan mengenai semua kegiatan desa kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah. Pada PP tersebut secara umum dijelaskan bahwa pemerintah desa wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati atau walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban meliputi semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah. ILPPDES yang telah dibuat oleh pemerintah desa pun tidak dipublikasikan kembali kepada masyarakat yang memang tidak mengikuti musyawarah.

Indeks Gini Desa Pesantren Tahun 2017

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan indeks Gini yang didapat sebesar 0,387. Jika merujuk pada nilai koefisien gini (Tabel 1) yang menyatakan bahwa jika koefisien gini lebih kecil nilainya dari 0,4 maka tingkat ketimpangannya rendah, dengan demikian tingkat ketimpangan di Desa Pesantren adalah rendah atau hasil dari pembangunan yang dilaksanakan sudah merata.



Gambar 5 Kurva Lorenz Desa Pesantren tahun 2017

Penentuan tingkat ketimpangan Kurva Lorenz didasarkan pada jarak kurva ke garis diagonalnya. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz dengan garis diagonalnya (kurvanya makin menyerupai garis lurus) maka mengindikasikan jika hasil distribusi dari pembangunan merata. Berdasarkan Gambar 11 menunjukkan bahwa Kurva Lorenz jaraknya semakin mendekati garis diagonalnya dan bentuk Kurva Lorenz sudah hampir

menyerupai garis lurus. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pesantren adalah merata.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dana desa belum sepenuhnya menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bias elit, dimana elit desa di Desa Pesantren memiliki peran dan kontrol yang lebih besar dalam pengelolaan dana desa, seperti dilibatkannya mereka dalam musyawarah perencanaan kegiatan atau pengambilan keputusan hingga rapat evaluasi. Adanya bias elit tersebut turut mempengaruhi respon masyarakat dalam mengelola dana desa.

Sikap masyarakat yang mengikuti musyawarah dan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah memiliki perbedaan. Masyarakat yang mengikuti musyawarah cenderung memiliki sikap yang positif terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah cenderung memiliki sikap yang negatif terhadap pengelolaan dana desa.

Tingkat partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah dan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah juga mengalami perbedaan. Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti musyawarah untuk pengelolaan dana desa tergolong tinggi. Tingginya tingkat partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat yang mengikuti musyawarah mengikuti setiap tahap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah, masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah untuk pengelolaan dana desa memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengikuti semua tahap partisipasi. Dari empat tahap partisipasi, masyarakat hanya mengikuti tahap pelaksanaan dan tahap menikmati hasil.

Hasil pendistribusian pembangunan di Desa Pesantren merata pada semua masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien gini sebesar 0,387. Angka tersebut lebih kecil dari ketentuan nilai koefisien gini yaitu 0,4 yang menandakan jika hasil pendistribusian pembangunan di Desa Pesantren sudah merata. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pesantren sudah tercapai meskipun belum maksimal.

Saran

Sebaiknya pengelolaan dana desa ini dapat melibatkan semua lapisan masyarakat dan tidak hanya elit desa saja agar pengelolaan dana desa dapat lebih partisipatif. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih kritis dan aktif dalam mengelola dana desa agar nantinya dana desa tersebut dapat dikelola dengan semestinya

Dukungan tokoh masyarakat sangat diperlukan mengingat tokoh masyarakat merupakan orang yang disegani dan pendapatnya akan didengar oleh masyarakat

Pemerintah pusat maupun pemerintah desa diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan sosialisasi mengenai dana desa sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang dana desa. Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar MA, Gani HA, Istiaji E. 2015. Dukungan tokoh masyarakat dalam keberlangsungan desa siaga di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2015*[Internet]. [diunduh 2017 Januari 26]. Tersedia pada: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66249>
- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2016. Persentase penduduk miskin Maret 2016

- [BPS] Badan Pusat Statistika. 2016. Pengeluaran konsumsi masyarakat.
- Desrita. 2016. Respon masyarakat terhadap usaha ekonomi desa simpan pinjam Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fisip* [Internet]. [diunduh 2016 Desember 1]; 3(2):1-13. Tersedia pada: [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=439573&val=6444&title=RESPON%20MASYARAKAT%20%20TERHADAP%20USAHA%20EKONOMI%20DESA%20SIMPAN%20PINJAM%20\(UEDSP\)%20DESA%20PULAU%20BUSUK%20JAYA%20KECAMATAN%20INUMAN%20KABUPATEAN%20KUANTAN%20SINGINGI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=439573&val=6444&title=RESPON%20MASYARAKAT%20%20TERHADAP%20USAHA%20EKONOMI%20DESA%20SIMPAN%20PINJAM%20(UEDSP)%20DESA%20PULAU%20BUSUK%20JAYA%20KECAMATAN%20INUMAN%20KABUPATEAN%20KUANTAN%20SINGINGI)
- Fajri E, Setyowati E, Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) studi pada kantor Desa Ketindan, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang [internet]. [diunduh pada: 2017 Januari 29]; 3(7):1099-1104. Tersedia pada: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/920>
- Harning SV. 2016. Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* [internet]. [diunduh pada: 2016 Oktober 8]; 1(1): 254-261. Tersedia pada: jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/viewFile/699/790
- Isnaini dan Siregar SM. 2015. Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten labuhanbatu dalam pemberian alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik* [internet]. [diunduh pada: 2016 September 26]; 6(2):154-173. Tersedia pada: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/73>
- Iqsan. 2015. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur [Internet]. [diunduh pada: 2017 januari 29]; 4(1): 230-240. Tersedia pada: <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/02/JURNAL%20%2802-18-16-11-36-38%29.pdf>
- Kusrini N, Amanah S, Fatchiya A. 2013. Sikap masyarakat terhadap program pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Teluknaga, Tangerang, Banten. *Sosio Konsepsia* [Internet]. [diunduh 2016 Desember 1]; 3(1):287-300. Tersedia pada: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/782/380>
- Mopangga H. 2011. Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo [Internet]. [diunduh 2017 Februari 3]; 10(1):40-51. Tersedia pada: <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43543/2010hmo.pdf;sequence=1>
- Nordiawan Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta(ID): Salemba Empat.
- Novia. 2015. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaat program alokasi dana desa studi di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. *Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri* [Internet]. [Diunduh 2016 Oktober 11]; 4(3): 1-17. Tersedia pada: <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sosioddev/article/view/674>
- [PP] Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa
- [Permendes] No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015
- Purwaningsih, Ernawati. (2008). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Jantra*, 3(6), 443-452.
- Sajogyo dan Pudjiwati. 2002. Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta(ID): Gadjah Mada University Press.
- Sulasmono BS. 1994. Respon masyarakat desa terhadap pembangunan industri besar (Kasus Desa Hardjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Syamsuddin. 2011. Perhitungan indeks gini rasio dan analisis kesenjangan distribusi pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2006-2010. *Jurnal Paradigma Ekonomi* [internet]. [diunduh pada 2017 Februari 3]; 1(4):83-102. Tersedia pada: <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/paradigma/article/view/144>
- Tumbel TN. 2014. Analisis bantuan desa terhadap pembangunan desa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum* [Internet]. [Diunduh 2016 Oktober 17]; 1(2): 1-12. Tersedia pada: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/download/7216/670>
- [UU] Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [UU] undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015.
- Uphof, Cohen JM, dan Goldsmith. 1979. Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation' A State of-the arth paper. New York: Cornell University.